



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 04**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-5
TUJUAN-----	1
RUANG LINGKUP-----	2 - 5
DEFINISI -----	6
KETENTUAN UMUM -----	7- 10
STRUKTUR DAN ISI -----	11- 65
PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/ KEUANGAN, EKONOMI MAKRO, PENCAPAIAN TARGET UNDANG-UNDANG APBN/PERATURAN DAERAH APBD, BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET-----	16-24
PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN-----	25-33
DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN-----	34-54
ASUMSI DASAR AKUNTANSI-----	35-39
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN-----	40-42
KEBIJAKAN AKUNTANSI-----	43-44
ISI KEBIJAKAN AKUNTANSI-----	45-54
PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN-----	55-57
PENGUNGKAPAN INFORMASI UNTUK POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS-----	58-61
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA-----	62-65
SUSUNAN -----	66
TANGGAL EFEKTIF -----	67



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **PERNYATAAN NO. 04**
3 **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
6 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
7 *Akuntansi Pemerintahan.*

8 **PENDAHULUAN**

9 **Tujuan**

10 1. Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur penyajian dan
11 pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

12 **Ruang Lingkup**

13 2. *Pernyataan Standar ini harus diterapkan pada:*

14 (a) *Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas pelaporan;*

15 (b) *Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan*
16 *untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas*
17 *pelaporan.*

18 3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang
19 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi
20 akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah
21 masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi
22 atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta
23 pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan
24 terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen
25 publik lainnya seperti laporan tahunan.

26 4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam
27 menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
28 laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

29 5. Suatu entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat
30 menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini diinginkan,
31 maka standar ini harus diterapkan oleh entitas tersebut walaupun tidak
32 memenuhi kriteria suatu entitas pelaporan sesuai dengan peraturan dan/atau
33 standar akuntansi yang mengatur mengenai entitas pelaporan pemerintah.

34 **DEFINISI**

35 6. *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
36 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
2 pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan
3 pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut
4 klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

5 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana
6 keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan
7 Perwakilan Rakyat Daerah.

8 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** adalah rencana
9 keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
10 Perwakilan Rakyat.

11 **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
12 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
13 manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
14 diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur
15 dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
16 diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
17 sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

18 **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
19 dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
20 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

21 **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
22 dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
23 dibayarkan.

24 **Belanja** adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah
25 yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
26 bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh
27 pemerintah.

28 **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
29 selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

30 **Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
31 lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
32 undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa
33 laporan keuangan.

34 **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
35 konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
36 suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
37 keuangan.

38 **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
39 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
40 pemerintah.

41 **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji
42 suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian
43 pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas
44 tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang
45 dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah
46 saji terjadi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 ***Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar***
2 ***kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada***
3 ***tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran***
4 ***berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama***
5 ***dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus***
6 ***anggaran.***

7 ***Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum***
8 ***Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode***
9 ***tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan***
10 ***tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.***

11

12 **KETENTUAN UMUM**

13 ***7. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan***
14 ***Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan***
15 ***dari laporan keuangan untuk tujuan umum.***

16 8. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan
17 keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya
18 untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena
19 itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat
20 mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk
21 menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas
22 Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna
23 dalam memahami Laporan Keuangan.

24 9. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari
25 pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi
26 anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep
27 akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor
28 komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan
29 keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan
30 referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca
31 laporan keuangan.

32 10. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan
33 akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat
34 menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

35 **STRUKTUR DAN ISI**

36 ***11. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara***
37 ***sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan***
38 ***Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi***
39 ***terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

40 12. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau
41 daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
42 Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam
43 Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan
44 dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
2 wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-
3 komitmen lainnya.

4 **13. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi**
5 **tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka**
6 **pengungkapan yang memadai, antara lain:**

- 7 (a) **Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi**
8 **makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD,**
9 **berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian**
10 **target;**
- 11 (b) **Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun**
12 **pelaporan;**
- 13 (c) **Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan**
14 **keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk**
15 **diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting**
16 **lainnya;**
- 17 (d) **Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan**
18 **Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam**
19 **lembar muka laporan keuangan;**
- 20 (e) **Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban**
21 **yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas**
22 **pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan**
23 **basis kas;**
- 24 (f) **Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk**
25 **penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka**
26 **laporan keuangan.**

27
28 14. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan
29 keuangan mengikuti standar berlaku yang mengatur tentang pengungkapan
30 untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, Pernyataan Standar Akuntansi
31 Pemerintahan tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan
32 akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

33 15. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada
34 Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik,
35 daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara
36 ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

37 **Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/** 38 **Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Undang-** 39 **Undang APBN/Peraturan Daerah APBD, Berikut Kendala** 40 **dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target**

41 **16. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu**
42 **pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan**
43 **entitas pelaporan secara keseluruhan.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 17. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas
2 Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab
3 pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi
4 keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.

5 18. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas
6 pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting
7 posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan
8 periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana
9 lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan
10 perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam
11 penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

12 19. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas
13 Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam
14 peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau
15 penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam
16 kebijakan penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas
17 anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan
18 pasar surat utang negara.

19 20. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan
20 atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro
21 yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD berikut tingkat capaiannya.
22 Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk
23 Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar,
24 harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.

25 **21. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan**
26 **perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan**
27 **dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh**
28 **DPR/DPD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target**
29 **yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh**
30 **manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan**
31 **keuangan.**

32 22. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi
33 tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan
34 persetujuan DPR/DPD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti
35 kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan
36 yang ada, yang disahkan oleh DPR/DPD, dibandingkan dengan anggaran
37 pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi
38 anggaran dan keuangan entitas pelaporan.

39 23. Dalam kondisi tertentu, entitas pelaporan belum dapat
40 mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan
41 bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang
42 ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan
43 atas Laporan Keuangan.

44 24. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen
45 entitas pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi
46 keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya
47 kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode
48 mendatang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama** 2 **Tahun Pelaporan**

3 **25. Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan**
4 **Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian**
5 **kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu**
6 **periode pelaporan.**

7 26. Kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah berbeda
8 dengan pengguna laporan keuangan nonpemerintah. Kebutuhan pengguna
9 laporan keuangan pemerintah tidak hanya melihat entitas pelaporan dari sisi
10 perubahan aset bersih saja, namun lebih dari itu, pengguna laporan
11 keuangan pemerintah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah bila
12 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

13 27. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan
14 secara obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan
15 pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan
16 efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan
17 keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Sedangkan efektivitas diukur
18 dengan membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan.

19 **28. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus**
20 **dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis**
21 **pemerintah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang-**
22 **undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam**
23 **Catatan atas Laporan Keuangan harus:**

- 24 (a) **Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk**
25 **mencapai tujuan;**
26 (b) **Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana**
27 **kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan**
28 (c) **Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh**
29 **manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan**
30 **bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan**
31 **dan andal;**

32 **29. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus:**

- 33 (a) **Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;**
34 (b) **Menyajikan data historis yang relevan;**
35 (c) **Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana**
36 **yang telah ditetapkan;**
37 (d) **Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh**
38 **manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan**
39 **untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada**
40 **dengan tujuan atau rencana.**

41 30. Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan
42 entitas pelaporan harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang
43 semestinya dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program.

44 31. Keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan
45 pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan harus diungkapkan sesuai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 dengan relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan atas
2 Laporan Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari satu
3 program ke program lainnya, namun biasanya faktor yang dibahas termasuk,
4 antara lain:

- 5 (a) Kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan hanya
6 menggunakan satu indikator saja;
7 (b) Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja
8 berada pada tingkat yang dilaporkan; dan
9 (c) Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan
10 konsekuensi yang tidak diinginkan.

11 32. Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan
12 informasi penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu
13 pengguna memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran
14 mengenai kinerja keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi pentingnya
15 faktor yang mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan yang
16 dilaporkan.

17 33. Informasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh,
18 informasi mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali
19 entitas, dan informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas
20 mempunyai pengaruh penting.

21 **Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan** 22 **Kebijakan Akuntansi Keuangan**

23 ***34. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan,***
24 ***entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan***
25 ***keuangan dan kebijakan akuntansi.***

26 **Asumsi Dasar Akuntansi**

27 ***35. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu***
28 ***mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan***
29 ***secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi***
30 ***atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.***

31 36. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan,
32 asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah
33 anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan
34 agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 35 (a) Asumsi kemandirian entitas;
36 (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
37 (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

38 37. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit
39 organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban
40 untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar
41 unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi
42 terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun
43 anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca
2 untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau
3 kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat
4 keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

5 38. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas
6 pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah
7 diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan
8 dalam jangka pendek.

9 39. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap
10 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini
11 diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam
12 akuntansi.

13 **Pengguna Laporan Keuangan**

14 40. Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang
15 berbeda-beda, seperti anggota legislatif, kreditor dan karyawan. Pemakai
16 penting lain meliputi pemasok, pelanggan, organisasi perdagangan, analisis
17 keuangan, calon investor, penjamin, ahli statistik, ahli ekonomi, dan pihak
18 yang berwenang membuat peraturan.

19 41. Terkait pada paragraf 34 di atas, para pemakai laporan
20 keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai
21 bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan
22 keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat
23 penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan
24 jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan
25 keuangan.

26 42. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan
27 dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti.
28 Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan
29 dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan,
30 karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan
31 untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas,
32 atau laporan lainnya terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

33 **Kebijakan Akuntansi**

34 ***43. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi***
35 ***perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan***
36 ***kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi***
37 ***entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan***
38 ***kegiatan.***

39 44. Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan
40 akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh
41 manajemen:

42 (a) Pertimbangan Sehat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya
2 diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak
3 membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.
- 4 (b) Substansi Mengungguli Bentuk Formal
5 Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan
6 disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak
7 semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.
- 8 (c) Materialitas
9 Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang
10 cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-
11 keputusan.

12 **Isi Kebijakan Akuntansi**

13 **45. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus**
14 **mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang**
15 **digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya**
16 **yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi**
17 **Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus**
18 **meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam**
19 **memilih prinsip-prinsip yang sesuai.**

20 **46. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas**
21 **Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:**

- 22 (a) **Entitas pelaporan;**
23 (b) **Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;**
24 (c) **Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan**
25 **keuangan;**
26 (d) **sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan**
27 **dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Pernyataan Standar**
28 **Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan;**
29 (e) **setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk**
30 **memahami laporan keuangan.**

31 47. Pengungkapan entitas pelaporan yang membentuk suatu
32 laporan keuangan untuk tujuan umum akan sangat membantu pembaca
33 laporan untuk dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada
34 laporan keuangan. Pembaca laporan akan mempunyai kerangka dalam
35 menganalisis informasi yang ada. Ketiadaan informasi mengenai entitas
36 pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca
37 dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.

38 **48. Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan**
39 **telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk**
40 **penyusunan laporan keuangan pemerintah, pernyataan penggunaan**
41 **basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan pemerintah**
42 **semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**
43 **Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan**
44 **Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan**
45 **memudahkan pembaca laporan tanpa harus melihat kembali basis**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **akuntansi yang tertera pada Kerangka Konseptual Akuntansi**
2 **Pemerintahan.**

3 49. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis
4 pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan
5 keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam
6 penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup
7 memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang
8 menggunakan basis pengukuran tersebut.

9 50. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi
10 diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan
11 tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang
12 tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam paragraf 44 dapat
13 dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang perlu
14 diungkapkan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan
15 untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- 16 (a) Pengakuan pendapatan;
17 (b) Pengakuan belanja;
18 (c) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
19 (d) investasi;
20 (e) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak
21 berwujud;
22 (f) Kontrak-kontrak konstruksi;
23 (g) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
24 (h) Kemitraan dengan pihak ketiga;
25 (i) Biaya penelitian dan pengembangan;
26 (j) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
27 (k) Pembentukan dana cadangan;
28 (l) Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
29 (m) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

30 51. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-
31 kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan
32 atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk
33 pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran
34 wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih
35 kurs.

36 **52. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun**
37 **nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya**
38 **tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi**
39 **yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar**
40 **ini.**

41 53. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan
42 angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan
43 akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak
44 perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **54. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai**
2 **pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika**
3 **berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.**

4 **Pengungkapan Informasi yang diharuskan oleh**
5 **pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang**
6 **belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan**

7 **55. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan**
8 **informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar**
9 **Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan**
10 **lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan,**
11 **seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain.**
12 **Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus**
13 **dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian**
14 **lain laporan keuangan.**

15 56. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang
16 digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai
17 dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar
18 muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat
19 memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu
20 diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat
21 mempengaruhi kondisi keuangan entitas pelaporan pada periode yang akan
22 datang.

23 57. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan
24 keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian
25 (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran
26 belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan
27 keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk
28 dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang
29 disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.

30 **Pengungkapan Informasi untuk Pos-pos aset dan**
31 **kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan**
32 **basis akrual atas pendapatan dan belanja dan**
33 **rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas**

34 **58. Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan**
35 **berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan**
36 **pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan**
37 **penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan**
38 **penerapan basis kas.**

39 59. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan pada paragraf
40 26 dan 76 memungkinkan entitas pelaporan menyusun laporan keuangannya
41 dengan basis akrual untuk pendapatan dan belanja. Entitas pelaporan
42 tersebut harus menyediakan informasi tambahan termasuk rincian mengenai
43 *output* entitas dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian
2 kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan. Hal ini dimaksudkan agar
3 pembaca laporan dapat memahami pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
4 dikarenakan penerapan basis akrual pada pos-pos pendapatan dan belanja,
5 seperti pendapatan yang diterima di muka, biaya dibayar di muka, dan biaya
6 penyusutan/depresiasi. Pos-pos aset dan kewajiban tersebut merupakan
7 akibat dari penerapan basis akrual atas pos-pos pendapatan dan belanja.

8 60. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan
9 antara Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran.
10 Laporan rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang
11 berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis
12 akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan
13 dan pengurangan aset bersih dikarenakan penggunaan basis akrual yang
14 kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai akhir pada Laporan
15 Realisasi Anggaran.

16 61. Untuk memudahkan pengguna daftar rekonsiliasi dan
17 penjelasan atas kondisi yang ada pada paragraf 59 dan 60, harus disajikan
18 sebagai bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan.

19 **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**

20 **62. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus**
21 **mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan**
22 **menyesatkan bagi pembaca laporan.**

23 63. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini
24 apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan,
25 yaitu:

- 26 (a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas
27 tersebut berada;
- 28 (b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- 29 (c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan
30 operasionalnya.

31 64. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan
32 kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- 33 (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
- 34 (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen
35 baru;
- 36 (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan
- 37 (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
- 38 (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya
39 pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

40 65. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku
41 sebagai pelengkap standar ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN

66. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- (a) Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD;
- (b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
- (c) Kebijakan akuntansi yang penting:
 - i. Entitas pelaporan;
 - ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan;
 - v. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- (d) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
- (e) Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual;
- (f) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.

TANGGAL EFEKTIF

67. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,
ttd

Sugiri, S.H.